

© 2004 Ken Martina
Makalah pribadi
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
June 2004

Posted 11 June 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr Ir Hardjanto

KONSEP AGROPOLITAN SEBAGAI ALTERNATIF KONSEP GROWTHPOLE DI INDONESIA: STUDI KASUS PULAU JAWA

Oleh:

Ken Martina

995118/PWD

kenmartina@cbn.net.id

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini banyak kota-kota di Indonesia berkembang pesat membentuk megarurban seperti Jabodetabek, Gerbangkertasusila, Bandung Raya dan lain-lain. Megaurban ini menarik kegiatan dan sumberdaya di sekitarnya, sehingga terkonsentrasi pada kota-kota utama dalam wilayah megarurban tersebut.

Pada gilirannya konsentrasi kegiatan ini menimbulkan permasalahan yang sulit ditangani, seperti kemacetan lalu lintas, pencemaran air dan udara, berkembangnya permukiman kumuh, maraknya kejahatan di perkotaan dan lain-lain. Misalnya konsentrasi kegiatan di DKI Jakarta sebagai kota utama megarurban Jabodetabek, telah menimbulkan konsentrasi dan pergerakan kendaraan menuju kota tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh penambahan jumlah kendaraan yang sangat tinggi rata-rata 11% per tahun. Kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari, apalagi tidak diimbangi oleh penambahan panjang jalan yang besarnya tidak sampai 1% per tahun. (Kompas, 1 November 2003).

Mengapa permasalahan yang sama banyak terjadi pada berbagai kota-kota di Indonesia ?. Permasalahan yang muncul pada suatu kota merupakan dampak dari strategi pembangunan yang diikuti oleh kota tersebut. Oleh karena itu untuk memecahkan persoalan, perlu diketahui apa dan bagaimana strategi pembangunan yang diikuti oleh kota-kota tersebut pada beberapa dekade sebelumnya. Untuk kota-kota di Indonesia sejak tahun 1960-an sampai sekarang.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sehingga dinilai lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pembangunan wilayah dapat diartikan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat dan perbaikan lingkungannya agar lebih baik dari sebelumnya. Indikator taraf hidup masyarakat biasanya digunakan indikator ekonomi melalui besarnya pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Sedangkan indikator lingkungan dinilai melalui keberlanjutannya (*sustainability*).

Agar dicapai keberhasilan pembangunan, setiap wilayah yang melakukan pembangunan akan mengikuti strategi pembangunan wilayah yang ditentukan sebelumnya dalam bentuk tujuan pembangunan wilayah dan merupakan paradigma pembangunan. Pada umumnya tujuan pembangunan wilayah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan.

Dalam konteks keruangan, beberapa konsep pembangunan wilayah telah diciptakan, misalnya **Weber (1909)** yang menciptakan konsep “lokasi industri”, **Christaller (1966)** yang menerapkan konsep “*central place*”, dan **Perroux (1955)** dengan konsep “*growth pole*”. Konsep tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, dalam bentuk strategi pembangunan. Strategi pembangunan yang dianggap berhasil dilaksanakan dan diterapkan di berbagai wilayah di dunia biasanya diikuti oleh negara maupun wilayah lainnya. Salah satu konsep keruangan yang banyak diikuti adalah konsep *growth pole* (kutub pertumbuhan).

Keberhasilan penerapan strategi *growth pole* di negara asalnya, membuat pemerintahan yang berkuasa di negara lain pada masa itu berusaha mencoba menerapkan juga di negara masing-masing termasuk di Indonesia, seperti dinyatakan oleh **Nagamine Haruo (2000 : 11)** : “Perencanaan wilayah sebagai

peramalan masa depan dalam pendekatan analitis dari Isard membawa pada publikasi pada pembangunan 'kutub', *growth pole*, *growth centers* dan kelompoknya selama paruh terakhir dari tahun 1960an. Pendekatan ini didasarkan pada realitas negara-negara industri di Barat dalam penerapannya efektif, begitu juga besar harapan dapat efektif diterapkan pada Negara-negara Dunia Ketiga”.

Stern menyatakan bahwa pada era tahun 1960an pemerintah pada berbagai negara mempunyai kekuasaan penuh terhadap perencanaan pembangunan di negaranya, hal ini mengingat pada tahun 1960an, baik masyarakat umum maupun pejabat pemerintah percaya bahwa pemerintah dapat mengerti ekonomi secara baik dan dengan kuat membawa negaranya ke arah tertentu. **Stern (2002 : 3)** Sehingga dapat dipahami mengapa konsep *growth pole* yang dianggap berhasil di negara Barat banyak diikuti oleh berbagai negara pada tahun 1960an.

Di Indonesia selain konsep *growth pole*, kebijakan pembangunan yang diterapkan lainnya yang mendukung konsep *growth pole* juga menimbulkan permasalahan, seperti *urban bias* (bias perkotaan) dan *pro Jawa*, sentralisasi kegiatan industri, dan lain-lain. Selain terciptanya megaurban sebagai akibat penerapan konsep *growth pole*, dampak lain yang dirasakan adalah pengangguran di perkotaan, sulitnya mencari alternatif pekerjaan di pedesaan dan lain-lain.

Banyaknya permasalahan yang diakibatkan oleh konsep *growth pole* baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya, mengakibatkan konsep *growth pole* menuai kritik (**Miyoshi, 1977**). Sehingga untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul, dan agar pemecahan persoalan efektif, perlu dipikirkan konsep keruangan yang dapat memecahkan permasalahan yang timbul sekaligus mempunyai tujuan keadaan lebih baik di masa depan.

Konsentrasi kegiatan dan jumlah penduduk di pulau Jawa dibanding pulau-pulau lain di Indonesia, serta strategi pembangunan *growth pole* yang juga diikuti oleh pemerintah Indonesia pada masanya, menunjukkan bahwa konsep *growth pole* pada akhirnya menimbulkan masalah. Khususnya di pulau Jawa.

Jumlah penduduk pulau Jawa sebesar 59,97% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 1990, meningkat menjadi 61,54% pada tahun 2000. Jumlah

penduduk perkotaan di pulau Jawa pada tahun 1971 baru sebesar 18,04% menjadi 48,75% pada tahun 2000. Kebijakan pemerintah Indonesia yang *pro Jawa* dan *pro urban* (Garcia-Garcia, 2000) dan sentralisasi industri di pulau Jawa yang menimbulkan mega urban di pulau Jawa (Henderson dan Kuncoro, 1996), menunjukkan konsep *growth pole* telah menimbulkan permasalahan baik di pulau Jawa maupun Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa suatu strategi pembangunan akan dirasakan dampaknya setelah beberapa tahun diterapkan. Suatu strategi pembangunan yang berhasil diterapkan pada suatu wilayah dan pada suatu masa, belum tentu berhasil atau memuaskan bila diterapkan di wilayah lain, hal ini mengingat setiap wilayah mempunyai karakteristik yang khas dan berbeda antar wilayah. Adanya permasalahan yang muncul setelah diterapkannya suatu strategi pembangunan akan mendorong penciptaan suatu strategi pembangunan yang baru sebagai antisipasi permasalahan yang muncul sebelumnya dan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Konsep *growth pole* yang sukses diterapkan di negara Barat ternyata kurang sesuai untuk diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Konsep ini yang ternyata lebih berpihak pada wilayah perkotaan, menarik penduduk menuju ke wilayah perkotaan. Ketimpangan yang muncul antara wilayah perkotaan dengan pedesaan menjadi semakin besar. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep yang dapat memecahkan permasalahan perkotaan sekaligus mendorong perkembangan di wilayah pedesaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka pertanyaannya adalah :

1. bagaimana sebenarnya konsep *growth pole*?
2. benarkah konsep tersebut menimbulkan masalah?,
3. untuk mengantisipasi masalah yang ditimbulkan, konsep bagaimana yang sesuai sekaligus dapat memberdayakan masyarakat di pedesaan?.

4. apakah konsep *agropolitan* dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul sekaligus memberdayakan masyarakat pedesaan?

1.3. Tujuan Penulisan

Konsep *growth pole* yang diterapkan dan menimbulkan dampak dapat diakibatkan oleh kajian yang kurang mendalam oleh pengambil keputusan yang memilih strategi *growth pole* untuk kebijakan tata ruang wilayahnya.

Tulisan ini bertujuan mengkaji konsep *growth pole*, beserta dampak yang ditimbulkannya, kemudian mengkaji konsep *agropolitan* sebagai alternatif konsep *growth pole* dengan studi kasus di pulau Jawa.

1.4. Kegunaan Penulisan

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konsep *growth pole* beserta perkembangannya, pemahaman konsep *agropolitan* serta kemungkinan penerapannya di Indonesia, khususnya di pulau Jawa.

II. LANDASAN PEMIKIRAN

2.1. Sejarah Konsep Growth Pole

Menurut **Miyoshi (1997)** sejarah konsep *growth pole* dapat dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah kelahiran konsep *growth pole*, tahap kedua penerapan konsep *growth pole* secara geografis, tahap ketiga konsep *growth pole* sebagai penyebab ketidakseimbangan wilayah, dan tahap keempat, menuju perbaikan konsep *growth pole*. Di Indonesia konsep *growth pole* juga memberikan dampak, akan diulas pada bagian akhir sub bab ini.

Konsep '*growth pole*' atau dikenal sebagai konsep 'kutub pertumbuhan' dibangun oleh **Perroux** pada tahun 1955. Konsep ini bersumber dari faktor-faktor aglomerasi dan teori-teori lokasi terdahulu (**Glasson-Sitohang, 1977 : 153**). Konsep ini mempunyai dasar dari ekonomi makro, oleh karenanya dasar utama adalah konsentrasi pertumbuhan ekonomi pada ruang tertentu (yang sebelumnya digambarkan oleh Perroux pada ruang abstrak).

Model struktur ruang yang muncul sebelumnya adalah teori tempat sentral (*central place theory*). Model ini banyak dikritik, dan konsep *growth pole* merupakan jawaban atas kritik terhadap teori tempat sentral tersebut.

Dalam praktek konsep *growth pole* cenderung lebih jauh daripada dasar teoritiknya sendiri. Disebabkan karena adanya beberapa ketidakselarasan kecil dalam karya Perroux semula, maka telah terjadi banyak kekaburan dalam literatur yang muncul kemudian. Dalam perkembangannya terdapat banyak definisi sebanyak pengarang yang menulis teori ini. **Darwent (1969 dalam Miyoshi 1997 : 2)** mencatat terdapat 155 referensi, sedang **Moseley (1974 dalam Miyoshi 1997 : 2)** mencatat 296 referensi yang berkaitan dengan *growth pole*.

Konsep *growth pole* berkembang pesat dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan (disebut strategi *growth pole*) baik pada negara-negara sedang berkembang pada tahun 1960an maupun negara maju, yang menerapkan dan mendiskusikannya dengan serius pada tahun 1970an. (**Miyoshi 1997 : 2**)

Pada tahap kedua, penekanan konsep *growth pole* adalah pada penerapan konsep *growth pole* dalam "perencanaan wilayah" yang dibahas dalam berbagai artikel. Ahli-ahli ekonomi yang banyak membahas tentang *growth pole* dan

mengaitkannya dengan perencanaan wilayah antara lain Boudeville dan Hirschman dan lain-lain. Menurut **Boudeville (Miyoshi 1997 : 4)** definisi growth pole adalah “satu set perluasan industri-industri yang berlokasi di suatu wilayah urban dan menyebabkan pembangunan kegiatan ekonomi lebih jauh melalui pengaruh zonanya”.

Friedmann (1966) menyatakan bahwa pola pembangunan wilayah di Amerika seyogyanya diterapkan pada semua negara sedang berkembang. Ini berarti konsep growth pole juga diikuti oleh banyak negara berkembang di dunia pada masa tersebut.

Gore (1984) menyimpulkan bahwa ahli ekonomi wilayah pada tahun 1960an berkaitan dengan konsep *growth pole* mempunyai pandangan yang sama , antara lain pertumbuhan terjadi secara bertahap, mereka percaya strategi *growth pole* dapat mencapai berbagai tujuan kebijakan wilayah dan hubungan antar wilayah secara empiris dapat dibuktikan kebenarannya.

Pada tahap ketiga, beberapa ahli ekonomi wilayah menjelaskan bahwa konsep growth pole menjadi penyebab ketidakseimbangan wilayah. Seperti **Stohr dan Todtling (1977)** menyusun suatu studi kasus dan menyimpulkan bahwa strategi *growth pole* tidak dapat membawa pembangunan ke wilayah belakangnya (*hinterland*). Strategi ini mungkin sukses dalam mengurangi disparitas *interregional*, tetapi *spread effect* terhadap wilayah sekitarnya sangat lemah, bahkan menyebabkan terjadinya disparitas *intra-regional*.

Pendapat Stohr dan Todtling didukung oleh **Polenske (1988)** yang menjelaskan dua pemikiran pada teoris growth pole yang menyatakan bahwa dominasi perusahaan-perusahaan tertentu adalah faktor positif dalam proses pembangunan, karena dibutuhkan untuk menolong sejumlah besar penduduk, maka para teoris *dependency* menyatakan bahwa dominasi membawa pengambilalihan produk surplus di suatu wilayah tidak digunakan oleh penduduk setempat, tetapi untuk para kapitalis.

Pada tahap keempat, setelah banyak kritik dilontarkan terhadap konsep *growth pole*, maka beberapa ahli ekonomi wilayah melakukan berbagai perbaikan dan dukungan terhadap konsep ini. **Richardson dan Richardson (1974)**

menyatakan bahwa kekecewaan terhadap kebijakan pusat pertumbuhan (*growth pole*) pada banyak negara bukan merupakan bukti bahwa prinsip polarisasi salah, hal ini karena adanya optimisme yang berlebihan dan waktu yang singkat dalam menerapkan konsep ini. Bahkan Higgins (1988) menyatakan bahwa strategi *growth pole* bukan kesalahan teori Perroux, tetapi kesalahan suatu versi yang memutarbalikkan penerapan teori ini melalui disiplin ilmu para ilmuwan tersebut.

Penerapan Konsep Growth Pole di Indonesia

Di Indonesia konsep *growth pole* juga diadopsi dalam strategi pembangunan wilayahnya. Dampaknya terbentuk megaurban pada berbagai wilayah yang sulit dibatasi, seperti Jabodetabek, Gerbangkertasusila dan lain-lain. Masalah berikutnya terjadi ketimpangan wilayah, terutama dalam hal kesejahteraan antara kota-kota utama dan wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu ada kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan potensial/sumber penghidupan, yaitu menuju kota-kota utama tersebut.

2.2. Konsep Growth Pole

Perroux berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial, sebagaimana halnya dengan perkembangan industri adalah bahwa “pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah; perkembangan ini menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka-ragam terhadap keseluruhan perekonomian”. (**Glasson – Sitohang, 1977 : 153**)

Perroux juga mengindikasikan bahwa pembangunan harus disebabkan/ditimbulkan oleh suatu konsentrasi (aglomerasi) tertentu bagi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang yang abstrak. (**Miyoshi, 1997 : 3**).

Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan (*growth pole*) sebagai “sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya”. (**Glasson – Sitohang, 1977 : 108**). Ia juga

membangun konsep growth pole sebagai suatu model perencanaan yang bersifat operasional, yang menerangkan suatu kondisi dimana pertumbuhan akan tercipta pada wilayah yang menimbulkan adanya kutub (*polarized region*).

Menurut Glasson (**Glasson – Sitohang, 1977 : 155**) konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografik berkaitan dengan teori growth pole, didefinisikan sebagai berikut :

- a. Konsep “*leading industries*” dan perusahaan-perusahaan propulsip, menyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam “*leading industries*” yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya.
- b. Konsep polarisasi, menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan.
- c. Konsep “*spread effect*” atau “*trickling down effect*” menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsip dinamik dari kutub pertumbuhan akan memencar keluar dan memasuki ruang di sekitarnya.

2.3. Konsep Agropolitan

Menurut **Departemen Pertanian (2002)**, agropolitan terdiri dari kata *agro* dan *politian (polis)*. *Agro* berarti *pertanian* dan *politian* berarti *kota*. Dengan demikian agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota. Sedang yang dimaksud dengan *agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) di wilayah sekitarnya*.

Lebih jauh Departemen Pertanian menjelaskan bahwa kota agropolitan berada dalam kawasan sentra produksi pertanian (selanjutnya kawasan tersebut disebut sebagai kawasan Agropolitan. Kota pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota Perdesaan atau kota nagari yang

berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya.

Kawasan agropolitan yang telah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut . **(Deptan, 2002)** :

- a. Mayoritas masyarakatnya memperoleh pendapat dari kegiatan agribisnis
- b. Didominasi oleh kegiatan pertanian, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan agrobisnis hulu(sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- c. Relasi antara kota dan daerah-daerah hinterlandnya bersifat interdependensi yang harmonis dan saling membutuhkan. Kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya(on farm) dan produk olahan skala rumah tangga(off farm) dan kota menyediakan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi pertanian.
- d. Pola kehidupan masyarakatnya sama dengan kehidupan kota karena prasarana dan sarana yang dimilikinya tidak berbeda dengan di kota.

Batasan kawasan agropolitan ditentukan oleh skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi bukan oleh batasan administratif. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada disetiap daerah.

III. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai perkembangan kinerja ekonomi, khususnya sektor pertanian, yang menunjang konsep growth pole, perkembangan penduduk di Indonesia. Dampak penerapan konsep growth pole di Indonesia dan khususnya di pulau Jawa. Penerapan konsep Agropolitan sebagai alternatif konsep growth pole.

3.1. Perkembangan Kinerja Ekonomi (khususnya Sektor Pertanian) dan Perkembangan Penduduk di Indonesia berkaitan dengan Penerapan Konsep Growth Pole

Pada dua dasawarsa 1970-an sampai tahun 1980-an strategi pembangunan nasional menitikberatkan pada sektor pertanian, utamanya tanaman pangan, yaitu padi. Pada periode tersebut (1969 – 1989), sektor pertanian menyumbang 3,8% terhadap PDB, dan sektor tanaman pangan menyumbang sebesar 60% dari PDB sektor pertanian. Pada saat bersamaan, pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 4,6% jauh melebihi pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%. Pada masa itu sektor tanaman pangan menyerap tenaga kerja lebih banyak. **(Anwar, 2001 : 6).**

Setelah pertengahan dasawarsa 1980-an, pada waktu Indonesia mengalami transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan jasa perbankan memperoleh proteksi pemerintah yang lebih besar, yang sering merugikan sektor pertanian berupa dikenakannya pajak-pajak ekspor dan pungutan dalam negeri ataupun pajak implisit seperti mata uang rupiah yang kelebihan nilai. Hal ini merugikan para petani serta menghambat pendapatan negara untuk memperoleh devisa dari ekspor sektor pertanian. Disertai tingginya sukubunga serta inflasi turut menjadi penghambat investasi di sektor pertanian budidaya. **(Anwar, 2001 : 6).**

Meskipun sektor pertanian menurun, tetapi secara keseluruhan ekonomi nasional bertumbuh dengan kecepatan relatif tinggi mencapai rata-rata 7,2% antara tahun 1970 – 1996. Keadaan ini mampu mendorong peningkatan pendapatan per kapita sebesar 5,1%. Tetapi diperkirakan pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut terutama telah didorong oleh pasokan-pasokan input melalui eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran seperti penebangan hutan, pemanfaatan sumberdaya bahari serta penambangan minyak, gas alam dan mineral lainnya **(Anwar, 2001 : 7).**

Transformasi struktur ekonomi yang bergeser dari sektor pertanian menjadi sektor industri, tentunya telah merubah peta keruangan di Indonesia. Ketika titik berat perekonomian pada sektor pertanian (tahun 1970-an), yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor industri, menjadikan pedesaan masih menjadi tempat penyebaran maupun lokasi penduduk. Tetapi begitu titik berat perekonomian pada sektor industri pada pertengahan tahun 1980-an, pergeseran konsentrasi penduduk ke wilayah perkotaan menjadi semakin besar. Hal ini mengingat sektor industri pada umumnya terkonsentrasi dan berada

di wilayah perkotaan. Dapat dilihat dari persentase jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 1971 yang baru mencapai 17,42% dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 35,91%. Bahkan pada tahun 2000 mencapai 42,15% (**lihat tabel 1**).

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk di Indonesia tahun 1970 s/d 2000

TAHUN	INDONESIA			PERSENTASE PENDUDUK INDONESIA		
	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
1971	20.765.272	98.467.227	119.232.499	17,42	82,58	100
1990	55.502.063	123.876.883	179.378.946	30,94	69,06	100
1995	69.937.110	124.817.698	194.754.808	35,91	64,09	100
2000	82.861.037	113.721.542	196.582.579	42,15	57,85	100

Sumber : BPS dan Hasil Perhitungan

Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 119.232.499 pada tahun 1971, 63,83% berada di pulau Jawa, meskipun terjadi penurunan persentase jumlah penduduk di pulau Jawa, tetapi secara keseluruhan jumlah penduduk pulau Jawa terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2**.

Tabel 2. Jumlah Penduduk P Jawa dan Luar P Jawa

TAHUN	PULAU JAWA	LUAR P JAWA	INDONESIA
1971	76.102.486	43.130.013	119.232.499
1990	107.581.306	71.797.640	179.378.946
1995	110.908.381	83.846.427	194.754.808
2000	120.978.005	75.604.574	196.582.579

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan perkembangan titik berat perekonomian nasional dan penyebaran penduduk, menunjukkan sektor industri sangat berpengaruh terhadap pola keruangan di Indonesia. Bila dikaitkan dengan dasar pemikiran konsep *growth pole* (lihat Boudeville), dapat disimpulkan Indonesia juga menerapkan konsep ini dalam kebijakan pembangunan nasional.

3.2. Dampak Penerapan Konsep Growth Pole di Indonesia dan Pulau Jawa

Seperti halnya di negara asalnya dan di negara-negara lain, penerapan konsep *growth pole* di Indonesia juga menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari, seperti sentralisasi, urbanisasi dan mega urban, pengangguran di perkotaan dan pedesaan, bias perkotaan dan pro Jawa.

3.2.1. Sentralisasi

Untuk mengetahui sentralisasi sektor industri di Indonesia sebagai dampak dari penerapan konsep *growth pole* akan dilihat berdasarkan data PDB di Indonesia yang dibagi dalam wilayah pedesaan dan perkotaan.

Bila diasumsikan sektor primer lebih terkonsentrasi di pedesaan, sektor sekunder dan tersier lebih terkonsentrasi di perkotaan, maka berdasarkan data PDB menunjukkan sumbangan sektor sekunder dan tersier bagi PDB semakin meningkat dari tahun 1976 s/d tahun 1998 (lihat tabel 3 dan gambar 1). Hal ini memperkuat dugaan bahwa strategi *growth pole* diikuti di Indonesia.

Tabel 3. Persentase PDB sektor Pedesaan dan Perkotaan di Indonesia

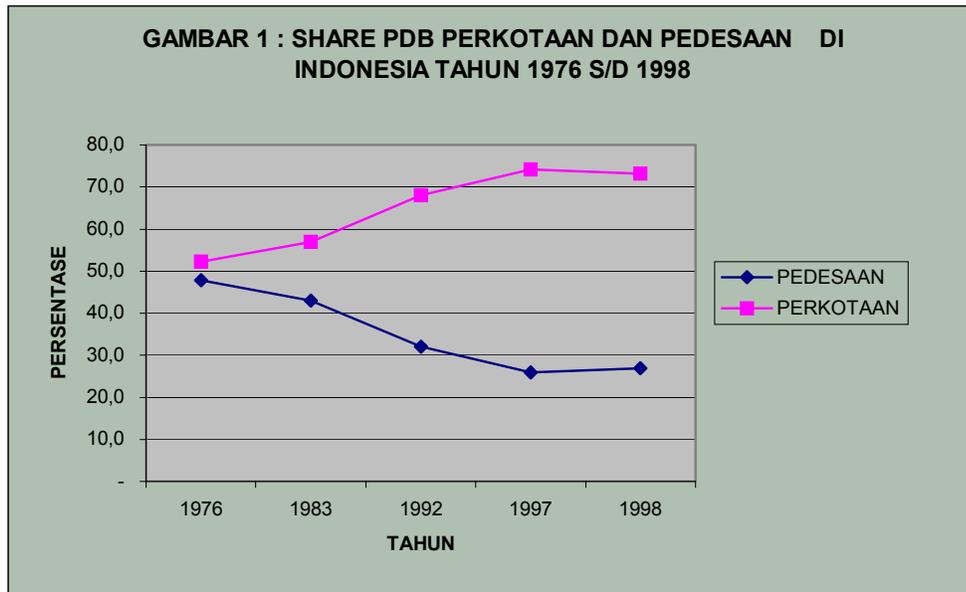
TAHUN	PEDESAAN	PERKOTAAN	JUMLAH
1976	47,8	52,2	100,0
1983	43,0	57,0	100,0
1992	32,0	68,0	100,0
1997	25,9	74,1	100,0
1998	26,9	73,1	100,0

SUMBER ; BPS DAN DIOLAH

CATATAN : Diasumsikan

Sektor Primer lebih terkonsentrasi di pedesaan

Sektor sekunder dan tersier terkonsentrasi di perkotaan



Dikaitkan dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia, yang secara keseluruhan ekonomi nasional bertumbuh 7,2% per tahun pada tahun 1980an, dan konsentrasi penduduk sebagian besar di pulau Jawa sejak tahun 1971 sampai tahun 2000 (lihat tabel 4), meskipun pulau tersebut merupakan satu dari 5 (lima) pulau besar di Indonesia, memperkuat dugaan strategi keruangan yang dianut Indonesia adalah konsep *growth pole*, khususnya terkonsentrasi di kota-kota di pulau Jawa.

Tabel 4. Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk di P Jawa dan Indonesia tahun 1971 s/d 2000

TAHUN	PULAU JAWA	LUAR P JAWA	INDONESIA
1971	64	36	100
1990	60	40	100
1995	57	43	100
2000	62	38	100

Sumber : BPS dan Hasil perhitungan

Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan Vernon dan Kuncoro yang melakukan penelitian sentralisasi sektor industri di Indonesia yang berkembang pada pertengahan dasawarsa 1980-an dan terus meningkat sampai tahun 1990-an,

terkonsentrasi dan tersentralisasi di wilayah perkotaan. (**Vernon dan Kuncoro, 1996 : 514**)

3.2.2. Urbanisasi dan Megaurban

Sentralisasi, urbanisasi dan megaurban saling berkaitan. Kebijakan sektor industri dengan sentralisasi kegiatan industri di pusat-pusat wilayah perkotaan, khususnya di pulau Jawa, telah menciptakan lapangan kerja dan menarik penduduk menuju pusat tersebut. Terbatasnya lapangan kerja di pedesaan, mengakibatkan terjadinya urbanisasi penduduk desa menuju kota, yaitu kota-kota dengan konsentrasi industri di dalamnya. Kota-kota tersebut utamanya berada di pulau Jawa. Akibat urbanisasi dan konsentrasi kegiatan, maka kota-kota besar meningkat membentuk metropolitan dan megaurban, seperti Jabodetabek, Bandungraya, Gerbangkertasusila.

Pada **tabel 5** dapat dilihat jumlah penduduk perkotaan di pulau Jawa terus meningkat sejak tahun 1971 sampai tahun 2000. Pada tahun 1971, jumlah penduduk perkotaan di pulau Jawa mencapai 13.727.869 jiwa atau 11,61% dari total jumlah penduduk Indonesia, dan tahun 2000 meningkat menjadi 58.980.731 atau 30%. Ini didukung hasil penelitian Vernon dan Kuncoro yang menyatakan di pulau Jawa terjadi peningkatan jumlah penduduk di 4 (empat kota) metropolitan (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang), mempunyai peningkatan jumlah penduduk sebesar 32%, dan meningkatnya tenagakerja sektor industri sebesar 51% (**Vernon dan Kuncoro, 1996 : 514**)

Tabel 5. Jumlah Penduduk di P Jawa dan Luar Jawa Tahun 1970 s/d 2000

TAHUN	PULAU JAWA			INDONESIA		
	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
1971	13.727.869	62.374.617	76.102.486	20.765.272	98.467.227	119.232.499
1990	38.395.914	69.195.392	107.581.306	55.502.063	123.876.883	179.378.946
1995	43.315.731	67.582.650	110.908.381	69.937.110	124.817.698	194.754.808
2000	58.980.741	61.997.264	120.978.005	82.861.037	113.721.542	196.582.579

Sumber : BPS 2003

Ini tentunya sebagai akibat penerapan konsep *growth pole* yang diterapkan dalam strategi keruangan di Indonesia. Yaitu konsentrasi pertumbuhan kegiatan ekonomi pada ruang. Konsentrasi ini di satu sisi akan didapatkan efisiensi, tetapi di pihak lain bila konsentrasi semakin besar, efisiensi sebagai hasil dari *trickling down effect*, atau penetesan kesejahteraan pada wilayah sekitarnya ternyata tidak terjadi, bahkan sebaliknya terjadi *backwash effect*, penyapuan sumberdaya yang ada di sekitar pusat atau *pole* yang ada.

Konsentrasi kegiatan di pusat (*pole*), dan urbanisasi serta terjadinya mega urban ternyata tidak didukung oleh penyediaan fasilitas kehidupan (air, listrik, transportasi) yang cukup di perkotaan. Hal ini mengingat adanya keterbatasan pemerintah kota (pusat) untuk menyediakan fasilitas tersebut apalagi mengingat jumlah penduduk yang melebihi kapasitas kota tersebut. Pada akhirnya terjadi penurunan kualitas kehidupan di wilayah pusat (*pole*) maupun wilayah perkotaan, sehingga meningkatkan biaya sosial sebagai akibat *diseconomy scale*, seperti pencemaran air dan udara, marak pencurian dll.

3.2.3. Pengangguran di Perkotaan dan Pedesaan

Kegiatan industri yang notabene berada di perkotaan, mempunyai kemampuan terbatas dalam menyerap tenaga kerja, sementara lapangan kerja di desa juga terbatas. Menurunnya kualitas sumberdaya alam di pedesaan, serta kurangnya penghargaan terhadap hasil pertanian (harga gabah yang rendah dan harga pupuk yang tinggi) diikuti oleh berkurangnya waktu tanam padi yang sebelumnya dapat dilakukan 2 (dua) kali setahun menjadi 1 (satu) kali setahun sebagai akibat perubahan cuaca dan berkurangnya pasokan air akibat berkurangnya mata air di pegunungan, telah menimbulkan banyak pengangguran di pedesaan.

Keterbatasan dan menurunnya kualitas sumberdaya alam di pedesaan mengakibatkan sulitnya mencari alternatif pekerjaan di pedesaan. Oleh karena itu angkatan kerja pedesaan yang menganggur mencari alternatif baru sumber penghidupan. Antara lain menuju ke kota (sebagai buruh bangunan, buruh galian dll) dan bahkan ke luar negeri sebagai TKI. Kota yang telah mengalami

permasalahan pengangguran bertambah lagi dengan adanya migrasi penduduk desa ke kota.

Oshima memperkirakan tingkat pengangguran terbuka secara umum di kota-kota Asia sebesar 10%. PBB memproyeksikan bahwa rasio pengangguran akan meningkat hingga tidak kurang dari 15% di tahun 1980 (**Rustan, 2002 :7**). Ini terbukti terjadi pengangguran besar-besaran di kota-kota di Indonesia khususnya di pulau Jawa.

3.2.4. Urban Bias dan Pro Jawa

Telah dijelaskan bahwa strategi pembangunan nasional, khususnya sektor ekonomi dalam perkembangannya lebih banyak mendukung sektor industri dan jasa perbankan. Meskipun ekonomi bertumbuh lebih pesat, ternyata hal ini merugikan para petani. Dukungan pemerintah terhadap sektor industri menunjukkan terjadi urban bias atau bias perkotaan.

Dugaan kebijakan pemerintah yang bias perkotaan dapat didekati melalui perkembangan distribusi PDB menurut sektor di primer, sekunder dan tersier di Indonesia sejak tahun 1976 sampai tahun 1998. Dengan asumsi sektor primer lebih terkonsentrasi di pedesaan, sektor sekunder dan tersier terkonsentrasi di perkotaan maka mendukung dugaan adanya indikasi kebijakan pemerintah yang bias perkotaan (lihat **tabel 3**).

Hal ini sesuai dengan karakteristik urban bias seperti dinyatakan oleh **Shioko Momose (2000 : 7)** : tiga karakteristik penting dari kebijakan yang bias perkotaan/urban bias, yaitu :

- 1) menitikberatkan pada pasar dan pertumbuhan ekonomi
- 2) memprioritaskan industri lebih daripada pertanian
- 3) alokasi sumberdaya lebih ke masyarakat kota daripada ke desa

Ternyata selain urban bias, strategi pembangunan di Indonesia juga pro Jawa. Hal ini telah dibuktikan oleh **Garcia-garcia (2000 : 96)**, dimana share sektor primer berasal dari pulau-pulau di luar Jawa jauh lebih besar , sedang sektor sekunder dan tersier lebih besar di pulau Jawa pada tahun 1993 – 1995 (lihat **tabel**

6). Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada masa itu yang lebih berpihak pada sektor industri dibanding sektor pertanian.

Tabel 6. Share sektor pada setiap Wilayah terhadap Rata-rata GDP Riil Tahun 1993 – 1995

	Indonesia	Sumatra	Jawa	Bali	Kalimantan	NTT, Timtim	Sulawesi	Maluku, Irija
Sektor Primer	29	51	17	22	49	40	38	57
Pertanian	17	22	13	21	18	38	35	23
Minyak dan Gas	10	27	2	0	27	0	0	4
Pertambangan	2	2	1	1	4	2	3	31
Industri tanpa Minyak & Gas	19	9	25	8	14	4	10	9
Jasa	52	40	58	71	37	57	52	34

Sumber : Garcia-Garcia, 2000

3.3. Penerapan Konsep Agropolitan di Indonesia dan Pulau Jawa

Dampak penerapan konsep *growth pole* lebih banyak dirasakan oleh penduduk pedesaan, hal ini mengingat harapan terjadinya *trickle down effect* tidak terpenuhi, bahkan terjadi *backwash effect*. Oleh karena itu perlu dipikirkan konsep baru yang dapat memecahkan persoalan yang diakibatkan penerapan konsep *growth pole* sekaligus meningkatkan kesejahteraan pada masa mendatang, utamanya bagi penduduk pedesaan. Dan mengingat di Indonesia, pulau Jawa sangat besar merasakan dampak dari konsep *growth pole* dibanding pulau-pulau lain di Indonesia, maka penerapan agropolitan pada pulau Jawa akan dibahas lebih mendalam.

Dasar pertimbangan penerapan konsep agropolitan, akan menjadi dasar mengapa konsep agropolitan sesuai digunakan untuk memecahkan permasalahan dampak konsep *growth pole*. Kemudian persyaratan suatu kota atau wilayah menjadi kawasan agropolitan diberikan sebagai alat penentuan pilihan kota-kota yang akan menjadi agropolitan. Berdasarkan kajian beberapa pemikir agropolitan, diusulkan konsep struktur tata ruang agropolitan, dan dikaitkan permasalahan yang terjadi di pulau Jawa, pada setiap pembahasan dilakukan kajian awal kemungkinan konsep agropolitan diterapkan di pulau Jawa.

3.3.1. Dasar Pertimbangan

Seperti dijelaskan di atas, permasalahan sebagai akibat penerapan konsep *growth pole* lebih banyak dirasakan oleh penduduk pedesaan, meskipun akar permasalahan berawal di kota. Oleh karena itu untuk memecahkan permasalahan yang timbul perlu dipikirkan suatu konsep ruang yang dapat memberdayakan potensi pedesaan. Sehingga pemecahan sekaligus dilaksanakan baik bagi penduduk pedesaan maupun penduduk perkotaan.

Melihat pengertian dan ciri-ciri kawasan agropolitan, maka penerapan konsep agropolitan memungkinkan dilaksanakan di Indonesia. Stohr dan Taylor (dalam **Miyoshi 1998 : 13**) mendiskusikan beberapa macam tipe strategi pembangunan di pedesaan, yang dikelompokkan dalam “*from above*” dan “*from below*” . Untuk negara-negara LDCs, dimana sebagian besar penduduk miskin tinggal di wilayah pinggiran (*periphery*) dan bermigrasi ke wilayah perkotaan tetapi tetap miskin, ada argumen dilakukan pembangunan “*agropolitan*” di wilayah pedesaan.

Apabila melihat permasalahan dampak konsep *growth pole*, maka kondisi yang diperlukan untuk mendukung konsep agropolitan adalah pembangunan pedesaan yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan desa-kota, serta adanya hubungan desa-kota yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualistis*) dan saling mendukung, sehingga didapat penyamaan kemitraan dalam berusaha antara penduduk desa dengan penduduk kota.

Menurut **Friedmann**, konsep agropolitan terdiri atas distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan dengan kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per Km² . Akan dijumpai kota-kota tani berpenduduk 10.000-25.000 jiwa dengan batas antar distrik 5-10 Km. Dimensi luasan geografis ini akan menghasilkan penduduk total antara 50.000-150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. (**dalam Rustan, 2002 : 20**).

Bila melihat besaran penduduk yang dijadikan ukuran distrik agropolitan, dan besarnya jumlah penduduk pedesaan di pulau Jawa sebesar 51,25% yang masih lebih besar daripada jumlah penduduk perkotaan (lihat **tabel 5**). Serta masih banyaknya kota-kota kecil dan menengah di pulau Jawa yang

memungkinkan difungsikan sebagai agropolitan. Maka konsep agropolitan dapat menjadi alternatif pemecahan sebagai akibat konsep *growth pole*.

Konsep pengembangan agropolitan selain ditujukan untuk membangun sektor perekonomian, juga diarahkan untuk membentuk dasar-dasar pertumbuhan daerah secara konsisten dalam jangka panjang. Tingkatan kota-kota dalam konsep agropolitan seperti kota besar, menengah dan kecil, disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pada masing-masing kota, serta fungsi dan peran kota yang ditunjuk sebagai agropolitan.

Penerapan konsep agropolitan secara tidak langsung juga memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah kehidupannya, terutama mengingat hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahui kondisi dan kemampuan dirinya serta wilayahnya, ini berarti konsep ini juga menunjang kebijakan otonomi daerah, dan memberi harapan bagi daerah yang telah memiliki komoditas pertanian unggulan sehingga lebih optimal memanfaatkannya.

Konsep agropolitan juga dapat melibatkan jumlah penduduk yang besar, terutama di pedesaan, sekaligus mengerem pergerakan penduduk pedesaan menuju ke perkotaan, karena sudah didapatkannya alternatif sumber penghidupan dan terpenuhinya fasilitas kehidupan di pedesaan dan pada kota-kota yang berfungsi sebagai agropolitan. Artinya sekaligus dapat mengurangi permasalahan pada kota-kota besar.

3.3.2. Persyaratan Kawasan Agropolitan

Menurut **Departemen Pertanian (2002)** dalam menerapkan agropolitan, wilayah yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi unggulan.
- b. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu:

- Pasar (pasar untuk hasil pertanian, sarana pertanian, pasar jasa pelayanan, dan gudang)
 - Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
 - Kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA)
 - Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)
 - Pengkajian teknologi agribisnis
 - Prasarana transportasi, irigasi dan semua yang mendukung usaha pertanian
- c. Memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai
- d. Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial (kesehatan, pendidikan, rekreasi dan sebagainya)
- e. Kelestarian lingkungan hidup (sumber daya alam, sosial budaya dan keharmonisan relasi kota dan desa)

Berdasarkan persyaratan tersebut, banyak kota-kota di pulau Jawa memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan agropolitan. Sebagai contoh kota Indramayu di Jawa Barat, dengan surplus produksi padi pada panen bulan April tahun 2004 dan beberapa tahun sebelumnya di wilayah belakangnya (kabupaten Indramayu), dan ketersediaan fasilitas sesuai persyaratan suatu kawasan agropolitan, maka kota tersebut dapat ditunjuk sebagai kawasan agropolitan.

3.3.3. Konsep Struktur Tata Ruang Agropolitan

Secara umum struktur hirarki sistem kota-kota agropolitan dapat digambarkan sebagai berikut : **(Rustan, 2002 : 24)**

Orde yang paling tinggi (kota tani utama) dalam lingkup wilayah agropolitan skala besar sebagai :

- Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah (nasional dan internasional) dan bila berada di tepi pantai maka kota ini memiliki pelabuhan samudra

- Pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri pertanian (*packing*), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas
- Pusat berbagai kegiatan tertier agro-bisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan.
- Pusat berbagai pelayanan (*general agro-industry services*)

Orde kedua (pusat distrik agropolitan) yang berfungsi sebagai :

- Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
- Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis.
- Pusat pelayanan agro-industri khusus (*special agro-industry services*), pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan.

Orde ketiga (pusat satuan kawasan pertanian)

- Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian
- Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
- Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
- Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian
- Koperasi dan informasi pasar barang perdagangan

Dilihat dari sektor transportasi, adanya konsep agropolitan dapat memberikan arahan pengembangan pembangunan jaringan jalan sesuai hirarki perkotaan, dimulai dari pedesaan menuju kota kecil dihubungkan oleh jalan lokal. Kota kecil ini dapat berfungsi sebagai pengumpul hasil pertanian dari pedesaan, merupakan kota orde ketiga dalam sistem kota-kota agropolitan. Berikutnya adalah dari kota kecil menuju kota menengah, dihubungkan oleh jalan kolektor. Di sini kota menengah sudah berfungsi sebagai pusat grosir, yang mengumpulkan hasil pertanian bersumber dari kota kecil, serta menjadi pusat pelayanan kegiatan agro industri. Terakhir dari kota menengah menuju kota besar yang dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sebagai kota orde tertinggi barang yang diangkut dari kota-kota menengah semakin banyak, sehingga dibutuhkan prasarana jalan dan

jenis kendaraan yang lebih besar. Oleh karena itu penyediaan jaringan jalan arteri sangat diperlukan. Dengan hirarki kota dan hirarki jalan yang jelas, akan dapat mengurangi risiko kerusakan jalan akibat penggunaan jalan yang tidak sesuai ukuran kendaraan maupun volume kendaraan.

Departemen Pertanian (2002) menyatakan bahwa batasan suatu kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dsb) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* dan *economic of scope*. Karena itu penetapan Kawasan Agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah. Secara abstraksi kawasan agropolitas dapat digambarkan secara skematis pada **gambar 2**.

IV. KESIMPULAN

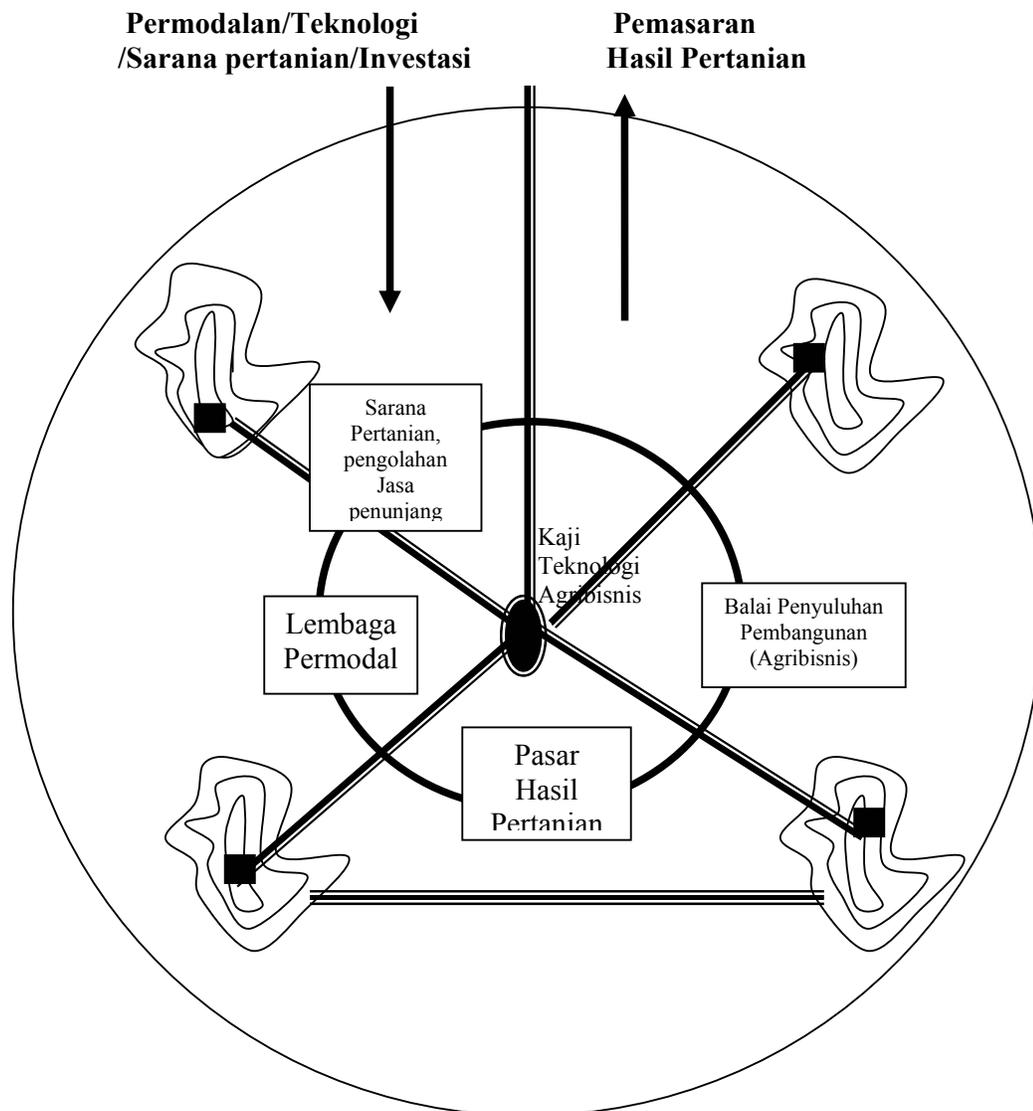
Konsep *growth pole* yang dibangun oleh **Perroux** pada tahun 1955 dan diterapkan pada berbagai negara di dunia, menunjukkan bahwa dalam penerapannya banyak berubah dari konsep awal pemikiran Perroux yang membangun konsep *growth pole* sebagai sistem dinamis pada ruang ekonomi abstrak.

Adanya kendala dalam penerapan konsep *growth pole* seperti ideologi yang berubah, perkembangan yang berlebihan, dan tidak sejalannya konsep ini dengan kondisi ekonomi nasional, maka penerapan konsep *growth pole* pada akhirnya menimbulkan masalah.

Pada dasarnya penerapan konsep *growth pole* pada suatu wilayah sampai batas tertentu dapat memberikan keuntungan, hal ini mengingat konsentrasi (*aglomerasi*) kegiatan ekonomi di satu pusat (*pole*) akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta keuntungan ekonomis dari wilayah secara keseluruhan.

Bila harapan *trickle down effect* dapat terwujud, selain pertumbuhan ekonomi wilayah, akan terjadi pula pemerataan ekonomi sehingga paradigma baru pembangunan (pertumbuhan dan pemerataan) dapat dicapai

Gambar 2. Wilayah Kawasan Agropolitan



Keterangan	
	Agropolitan
	Pemukiman
	Lahan Pertanian (desa hinterland)
	Irigasi
	Prasarana Jalan
	Batas Wilayah Kawasan Agropolitan

Sumber : Departemen Pertanian 2002

Di samping memberikan keuntungan, penerapan konsep *growth pole* juga mengandung kelemahan. Konsentrasi yang semakin besar akan merubah kondisi yang semula didapat keuntungan ekonomis menjadi *diseconomy of scale*, karena akan muncul ongkos transport yang tinggi untuk mencapai pusat (*pole*), waktu tempuh yang lama, kemacetan lalu lintas, dan pada akhirnya terjadi biaya sosial tinggi (sebagai akibat polusi udara, pencemaran air, maraknya kejahatan, menurunnya kualitas kehidupan, dll)

Bila dalam penerapan konsep *growth pole*, tidak terjadi *trickle down effect*, tetapi sebaliknya *backwash effect* (dalam hal pengurusan sumberdaya alam), akan berakibat terjadi kesenjangan yang besar antara pusat (*pole*) dan *hinterlandnya*. Akibatnya, penduduk di daerah *hinterland* yang membutuhkan sumber penghidupan untuk kelangsungan hidupnya akan menuju wilayah yang dianggap dapat memenuhinya, yaitu di pusat (*pole*), sehingga pusat menjadi semakin besar.

Negara Indonesia, yang menitikberatkan sektor pertanian dalam strategi pembangunannya pada periode tahun 1970an sampai awal tahun 1980an, mengindikasikan konsep *growth pole* belum sepenuhnya diterapkan. Pada masa tersebut masih terjadi keseimbangan atau pemerataan kesejahteraan antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan, meskipun pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Begitu terjadi transformasi ekonomi, dimana kebijakan pemerintah lebih berpihak pada sektor industri, dan menunjukkan diterapkannya konsep *growth pole*, pemerataan kesejahteraan tidak terjadi. Hal ini menunjukkan yang terjadi di Indonesia adalah *backwash effect*, bukan *trickle down effect*.

Kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor industri, sebagai pengejawantahan konsep *growth pole*, menimbulkan permasalahan baru, seperti urbanisasi dan megaurban, pengangguran di perkotaan dan pedesaan. Pada akhirnya terjadi *diseconomic of scale*, karena biaya-biaya sosial yang tinggi yang harus ditanggung oleh penduduk perkotaan.

Pulau Jawa, sebagai pulau yang subur, sejak dahulu telah menarik penduduk Indonesia untuk berdomisili di pulau ini, tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor industri, lebih memperhatikan pulau Jawa (pro Jawa) dan kebijakan penerapan konsep *growth pole*,

menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pulau Jawa, karena pulau ini menjadi semakin padat penduduk, dan terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia dan khususnya di pulau Jawa, membawa pada pemikiran diperlukan suatu konsep baru yang dapat memecahkan dampak konsep *growth pole* menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

Meskipun konsep *agropolitan* juga merupakan konsep yang datang dari Barat, tetapi apabila melihat kondisi alam dan banyaknya penduduk di Indonesia, konsep agropolitan memungkinkan digunakan sebagai alternatif konsep *growth pole*. Hal ini mengingat penduduk yang terlibat lebih banyak, wilayah yang dicakupinya lebih luas, dan lebih berpihak ke wilayah pedesaan. Sehingga dua tujuan pemberdayaan penduduk dan wilayah pedesaan sekaligus memecahkan permasalahan di perkotaan dapat dilaksanakan.

Pengalaman membuktikan suatu konsep pembangunan mempunyai keterbatasan, maka agar didapat hasil yang optimal, dalam menerapkan konsep agropolitan harus memperhatikan batasan-batasan serta kendala dari penerapan konsep ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affendi Anwar. 2001. **Pembangunan Wilayah Pedesaan dengan Desentralisasi Spatial melalui Pembangunan Agropolitan yang Mereplikasi Kota-kota Menengah dan Kecil**. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Departemen Pertanian, 2002. **Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan**. Jakarta.
- J. Vernon Henderson and Ari Kuncoro, September 1996. **Industrial Centralization in Indonesia**, The World Bank Economic Review. Volume 10 Number 3.

- John Glasson – Paul Sitohang. 1990. **Pengantar Perencanaan Regional**. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jorge Garcia Garcia, December 2000, **Indonesia's Trade and Price Interventions : Pro – Java and Pro – Urban**, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 36 No. 3.
- Nagamine Haruo. 2000. **Regional Development in Third World Countries – Paradigms and Operational Principles**. The International Development Journal, Co. Ltd. Tokyo. Japan.
- Takahiro MIYOSHI. 1997. **Successes and Failures Associated With the Growth Pole Strategies**. Department of Economic Studies, University of Manchester.
- Uton Ruston Harun. 2002. **Tinjauan Kembali Konsep Agropolitan Dalam Konsep Pengembangan wilayah di Indonesia**. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung.